Prof., Dr.Habib Zarbaliyev

DIALOG BUDAYA, DAN TOLERANSI DI ERA GLOBALISASI

Pendahuluan. Paparan mengenai peperangan, pengeboman dan rusuhan yang mengakibatkan kematian banyak nyawa, kehilangan orang tersayang, kerusakan harta benda dan kemusnahan alam sekitar yang berlaku di beberapa buah negara adalah paparan biasa di media-media massa sekarang. Begitulah situasi dunia dewasa ini yang penuh dengan ketegangan dan persengketaan sehingga sukar untuk diramal kapankah dunia dan penghuninya akan menikmati kehidupan yang damai dan aman tanpa konflik?

Ketegangan dan persengketaan yang berlaku dalam sejarah peradaban manusia yang sedang melanda kini, seolah-olah membenarkan ramalan S.P.Huntington melalui bukunya yang menimbulkan kontrovesi yaitu "*The Clash of Civilization and The Remaking World Oder*", bahawa dunia akan menyaksikan pertentangan antar peradaban pada abad ke-21 ini dan akan menjadi penentu kepada masa depan politik dunia [Hungtington 1996 b]. Malah melalui teorinya, S.P.Huntington telah mengaitkan Islam sebagai punca tercetusnya segala konflik. Maka tidak hairanlah sekiranya Barat hari ini telah menjadikan teori ini sebagai alasan untuk memerangi kumpulan-kumpulan Islam yang dianggap dalang keganasan dan pencetus konflik seperti yang diisytiharkan oleh pentadbiran Amerika Syarikat selepas peristiwa pengeboman pada 11 September 2001 di New York dengan melancarkan operasi ketentaraan di Afghanistan. Tindakan Amerika tersebut yang ternyata tiada alasan kukuh telah mengundang banyak ketegangan selepas itu.

Namun disebalik ketegangan dan persengkataan serta peperangan yang berlaku yang kononnya dicetuskan oleh pengganas-pengganas Islam oleh pihak-

pihak tertentu, masih banyak ahli ilmu politik dan pemerhati berpendapat bahawa keegoan dan keangkuhan kuasa Barat khususnya Amerika selepas tamat Perang Dingin adalah punca sebenar kepada pertembungan peradaban Barat dengan bukan Barat atau lebih khusus Timur/Islam sehingga meledakkan ketegangan dan konflik antara peradaban.

Hal ini sememangnya ada kebenarannya, di mana dunia global kini telah dicorakkan oleh peradaban Barat melalui proses hegemoni dari aspek politik, ekonomi, budaya dan sebagainya. Penentuan baik atau buruk, betul atau salah seakan hanya boleh ditentukan oleh kuasa-kuasa Barat. Fenomena uni-polar dan sikap *double standard* kuasa-kuasa Barat ini dilihat meletakkan masyarakat di negara-negara kecil, khususnya negara-negara Islam berada di dalam keadaan resah, kecewa dan marah yang mendorong golongan tertentu untuk bertindak-balas [Shah Rani 2015].

Kerumitan hubungan antara peradaban yang begitu serius sifatnya sehingga para ahli menyifatkan alternatif yang wujud bagi manusia buat masa hadapan cuma dua sahaja, yaitu "mati" atau "dialog". Namun menurut para ahli yang mengkaji masalah ini, manusia hari ini sedang menempa satu cara hidup yang lebih dialogikal dan sedang menuju satu zaman Dialog Peradaban kerana manusia hari ini semakin sadar akan kuasa dan kegunaan dialog [Azizan Baharuddin 2005].

Di sini kami menyinggung soal-soal dialog budaya yang merupakan prasyarat segala macam dialog, dan toleransi di era globalisasi.

1. Salah satu syarat utama pendekatan dan persilangan budaya-budaya yang berbeda adalah adanya nilai-nilai yang khas semua budaya (nilai-nilai universal). Sekaligus, pendekatan, persilangan budaya-budaya yang berbeda, juga ada batasnya. Setiap budaya berusaha untuk melindungi diri, berkembang dan dengan demikian,

menjamin kekayaan dan keanekaragaman nilai-nilai etnokultural, keagamaan, politik, ekonomi, profesional, kooperatif dst. dari kelompok-kelompok sosiokultural.

Untuk mencapai konsensus terkait dengan komposisinya nilai-nilai universal, kita terlebih dahulu perlu memastikan inti pengertian nilai. Menurut sosioloq Rusia N.Lapin, nilai-nilai adalah tujuan yang tergeneralisasi yang memainkan peran norma-norma fundamental, dan sarana untuk mencapainya. Nilai-nilai inilah menolong memilih perilaku individual dan dengan demikian, menjamin integrasi masyarakat. Setiap nilai dan keseluruhan nilai-nilai itu menemukan manifestasinya dalam individu dan masyarakat. Nilai-nilai dasar ada dua jenisnya: nilai tradisional dan nilai posttradisional [Лапин 2010, 105-107]. Ada juga nilai-nilai kultural invarian yang khas semua budaya, yaitu nilai yang merupakan nilai universal. Setiap masyarakat membentuk struktur nilai-nilai yang mencerminkan ciri-ciri etnik dan sejarah dari masyarakat itu.

Pemenuhan kebutuhan persepahaman dari rakyat-rakyat adalah syarat utama untuk dialog global dan persilangan budaya-budaya. Kesepahaman adalah bukan hanya kebutuhan saja, tetapi juga nilai universal yang harus ditetapkan di tingkat setiap masyarakat dan persatuan global.

Di seluruh sistem nilai-nilai manusia dan masyarakat, tempat utama diambil nilai-nilai budaya. Nilai budaya, pada gilirannya, dibagi dua grup: pertama, keseluruhan karya-karya intelktual, artistik dan keagamaan yang menonjol, kedua, prisip-prinsip hidup bersama yaitu stereotip adat-istiadat, tradisi, kesadaran dan perilaku, hukum. Semua ini memainkan peran penting dalam pengembangan integrasi masyarakat, persepahaman, solidaritas, dan bantu-membantu. Kedua grup nilai-nilai budaya ini membentuk inti dari budaya apapun dan menentukan keunikannya [Садохин 2006, 46].

Budaya-budaya yang berbeda yang memiliki sistem nilai-nilai khas bagi masing-masing, dan pandangan yang berbeda tentang tempatnya manusia di masyarakat dan dunia, selalu bersilang, dan melakukan kontak dengan satu sama lain. Tetapi sampai beberapa waktu terakhir, budaya-budaya yang berbeda itu sampai batas tertentu terisolasi dari hubungannnya dengan satu sama lain. Proses globalisasi masa kini, sama sekali menyingkirkan keadaan isolasi itu, dan tidak memungkinkan perkembangan budaya secara terasing. Dalam suasana seperti ini satu-satunya cara untuk mencegah bentrokan budaya adalah pelaksanaan dialog antar budaya. Dalam hubungan timbal balik dari budaya-budaya berbeda, hanya toleransi saja tidak cukup, karenanya setiap budaya pada intinya bersifat ekspansionis. Kaum pembawa suatu budaya selalu menganggap bahwa budayanya adalah yang paling baik, paling tinggi, dan oleh karena itu, perlu diterima kaum pembawa budaya lain.

Dialog mungkin hanya dalam suasana persepahaman. Dan itu terutama memerlukan adanya beberapa nilai yang umum, dan prinsip-prinsip keterjalinan yang sudah diterima oleh semua.

Di budaya-budaya yang berbeda, pandangan tentang nilai juga sangat berbeda Umpamanya sikap terhadap hak asasi manusia. Sebagaimana diketahui, meskipun pandangan tentang hak asasi manusia adalah produk peradaban Barat, hak-hak ini asalnya biologis, dan menyatakan sifat manusia. Oleh karena itulah hak tersebut dinamakan hak alami.

Ada pendapat bahwa hak asasi manusia adalah hasil perkembangan tertentu dari peradaban yang terbentuk di daerah kongkrit, yaitu di Eropa, dan oleh karena itu tidak wajib untuk daerah-daerah dunia yang lain-lainnya. Menurut pendapat lain, meskipun hak manusia secara historis terbentuk di daerah tertentu dan dalam batas budaya tertentu, hari ini ia bersifat universal. Oleh sebab itu masa depan manusia tidak mungkin dibayangakan di luar hak-hak tersebut.

Tetap patut diakui juga bahwa di sistem budaya-budaya yang berbeda, ada sikap-sikap yang berbeda mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan hak manusia (khususnya dengan masalah terkait nisbah hak individu dan hak masyarakat, dsb.). Oleh karena itulah, adanya diskusi seputar hak manusia juga terkait hanya dengan pemahaman yang berbeda kebebasan manusia, martabatnya. Yang penting ialah bahwa diskusi-diskusi ini patut diadakan dalam rangka dialog. Unsur-unsur dan prinsip-prinsip satu sistem tidak boleh dipaksakan pada sistem lain dengan cara penggunaan tekanan ekonomi, politik, atau teknologi informasi.

Nilai-nilai universal memiliki konten universal yaitu konten yang khas seluruh umat manusia, dan berbeda hanya dengan bentuk ekspresinya. Di antara nilai-nilai tersebut kita patut menitikberatkan nilai pribadi manusia. Nilai inilah berdominasi dalam sikap terhadap masyarakat, negara, agama, dst. Sebagai nilai universal, kita dapat menitikberatkan juga nilai hati nurani. D.S.Likhacov menamakannya sebagai inti dari budaya umumnya [Лихачев 2006].

2. Meskipun budaya-budaya berbeda, pandangan budaya-budaya itu tentang manusia, tentang hak-hak dan kebebasan-kebebasan manusia juga berbeda, semua budaya harus menyusuli satu kriteria – perlindungan martabat, kebebasan manusia, dan keadilan. Budaya-budaya yang berbeda yang menghadapi tantangan potensial, dapat mencapai nilai-nilai umum hanya bersama, melaui dialog. Ini adalah satu-satunya cara bagi budaya-budaya untuk melindungi diri, dan berkembang. Kalau tidak, budaya apaun secara terpisah tidak dapat menolak tantangan-tantangan ini (khusunya tantangan teknologi).

Ditancapkannnya nilai-nilai asing, standar-standar dari budaya lain di benak orang, memberi dampak negatif pada hubungan masyarakat yang terbentuk secara historis, menghalangi perkembangan yang stabil. Sejarah politik abad XX juga menegaskan bahwa invasi ke masyarakat-masyarakat tradisional melalui resep perubahan politik, revolusi, akhirnya mengakibatkan kaos dan porak-peranda.

Sayangnya di abad XXI juga, beberapa negara maju masih meneruskan usahanya untuk memaksakan standar-standar mereka, gaya hidup, standar budayanya pada dunia ketiga dengan alasan bahwa sistem-sistem budaya mereka-mereka adalah yang paling tinggi. Afghanistan, İraq, Libia, Suriah adalah hasil yang belum lengkap dari pandangan semacam ini.

Politik negara-negara maju yang mengejar tujuan menggoyangkan sandaran kesusilaan, budaya, keagamaan dari peradaban dunia, mengabaikan kepentingan, norma dan tradisi nasional, membataskan kedaulatan negara-negara, menyesuaikan struktur semua peradaban dengan model Eurosentrik, adalah dimensi-dimensi tersembunyi dari globalisasi.

Berbeda dengan Eurosentrisme yang mengandung pandangan primitif seperti ketidaksetaraan peradaban-peradaban, budaya-budaya, keunggulan budaya Eropa, **pendekatan sivilisasional**, dengan berkampanye untuk keaslian, keunikan gaya hidup dari bangsa-bangsa yang tergolong kelompok-kelompok sosiobudya yang berbeda, dan usaha mereka untuk melindungi identitas diri, **menolak** pandangan sepihak, homogen tentang perkembangan dunia. Perikemanusiaan pendekatan ini juga ialah bahwa pendekatan ini menolak hirarki peradaban-peradaban, dan pembagiannya dua yaitu progresif dan terbelakang. Ini merupakan faktor penting bagi dialog budaya, karena dialog harus berlandaskan pada prinsip-prinsip persamaan, kerja sama dan saling tukar-menukar, harus menolak ditancapkannya budaya-budaya, nilai-nilai dan standar yang memiliki kemungkinan-kemungkinan yang lebih kuat, di benak kaum pembawa budaya lain secara paksa.

Tidak mungkin tidak setuju dengan Huntigton yang menegaskan bahwa jalan perkembangan khas Barat tidak pernah merupakan dan tidak akan pernah merupakan jalan umum untuk 95 persen penduduk dunia. Meskipun Barat adalah unikal, namun tidak universal [Huntington 1996 a].

Keterjalinan dan saling tukar-menukar dari budaya-budaya adalah langkah penting untuk pendekatan peradaban-peradaban dan bangsa-bangsa yang berbeda. Ini terlebih dahulu mempersyaratkan penjaminan keterpaduan semua negara, semua bangsa, semua orang untuk membentuk tata dunia yang baru, yang lebih adil. Keterpaduan ini harus berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang sudah diterima oleh semua negara, yaitu nilai-nilai, prinsip-prinsip yang tercantum dalam piagam, dokumen-dokumen PBB dan lembaga-lembaga internasional lainnya. Ini meliputi antara lain penghormatan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan-kebebasaan manusia, penilaian tinggi kehormatan dan martabat individu, supremasi hukum dan undang-undang, penghormatan terhadap orang yang dibesarkan di sebuah masyarakat sosial-budaya yang berbeda, persamaan budaya-budaya yang berbeda, saling tukar-menukar dengan bebas nilai-nilai kultural dan inovasi ilmiah, teknis dan produksi, tidak dapat diterimanya memaksakan nilai-nilai dan standar "peradaban-peradaban tinggi" pada lingkungan sosiokultural lain. Nilai-nilai universal yang terbentuk dalam proses pengembangan budaya-budaya yang berbeda, dapat dan harus membentuk dasar dari gerakan untuk kesatuan budaya-budaya itu. Sayangnya, globalisasi masih bergerak menuju persatuan nilai-nilai budaya konsumen massa, bukanlah menuju persatuan nilai-nilai umat manusia. Oleh karena itu penetapan nilai-nilai seluruh umat manusia harus menjadi sebagai tujuan utama baik secara terpisah maupun untuk semua budaya, kaum pembawa budaya-budaya itu, dan juga untuk seluruh umat manusia.

Integrasi, keterjalinan sama sekali tidak harus mengejar tujuan penciptaan "budaya global". Kita patut mendukung usaha apapun untuk melestarikan keunikan, nilai-nilai dan tradisi-tradisi dari segala macam budaya, kita tidak boleh mengizinkan perusakan panorama budaya umat manusia.

Dalam teori nilai-nilai, juga prinsip nisbah dari aspek-aspek sosial, etnis dan seluruh umat manusia mempunyai arti penting. Kalau suatu masyarakat bersandar

semata-mata pada nilai-nilai sosial saja, hal ini dapat menyebabkan timbulnya sikap acuh tak acuh, indiferen terhadap baik budaya sendiri maupun budaya dunia.

Di masyarakat-masyarakat tradisional di mana nilai-nilai etnik diutamakan, ketergantungan individu dari adat-istiadat, tradisi, norma dan stereotip etnik biasnaya memberi pengaruh negatif terhadap pembentukan individu sebagai pribadi, terhadap pengembangannya. Dominasi nilai-nilai etnik mengakibatkan ditolaknya menyadari dan mengakui budaya-budaya lain. Masyarakat-masyarakat sedemikian rupa memperhatikan hanya kepentingan nasional sendiri. Hal ini pada akhirnya menimbulkan sifat-sifat negatif seperti sovinisme, nasionalisme yang berlebihan. Sebaliknya, dominasi kecendrungan masyarakat terhadap budaya-budaya lain, nilai-nilai dari budaya-budaya itu, pada akhirnya menyebabkan dijahuinya masyarakat tersebut dari nilai-nilai budaya nasionalnya (dekulturusasi), dan menciptakan kondisi untuk disebarluaskannya suatu “quasi-budaya” massa.

Oleh karena itu pengembangan merata setiap masyarakat mungkin hanya apabila ada imbangan nilai-nilai sosial, etnik dan umat manusia, apabila nilai-nilai itu dapat saling mempengaruhi. Untuk menciptakannya keadaan sedemikian rupa masyarakat harus menepati beberapa syarat penting. Komunikasi dan interkoneksi antarbudaya berkait dengan penyadaran perbedaan kultural. Orang-orang tidak harus merasa puas hanya dengan adanya perbedaan kultural, harus menyadari inti nilai-nilai itu secara mendalam, harus mengakui, menerima keunikan budaya-budaya lainnya dan memperhitungkannnya dalam perilakunya.

Setiap bangsa mempunyai pandangan sendiri tentang sistem nilai-nilai, dan tak seorang pun boleh memaksakan sistem nilai sendiri pada kelompok lainnya. Dalam hubungan antar bangsa, kesataraan sistem nilai-nilai adalah syarat yang paling penting untuk persamaan negara, koeksistensi damai bangsa-bangsa dan negara-negara, dan untuk dialog sama rata.

Keragaman budaya dalam masyarakat internasional ada secara objektif, dan keragaman ini merupakan faktor sistemik yang mengorganisasikan (systemic organizing factor) dari keanekaan dunia. Oleh karena itu penghormatan terhadap keragaman yang ada, merupakan pokok kultural yang paling penting dari penjaminan perdamaian global. Upaya untuk menggantikan keragaman budaya menjadi hanya satu model saja berdasarkan keperkasaan militer atau ekonomi, berarti merusakkan dasar perdamaian internasional. Tanpa menyadari dan menerima secara timbal balik keistimewaan, sistem nilai-nilai, standar moral, standar tata krama dan gaya hidup setiap negara, setiap bangsa, tanpa menciptakan keselarasan antara mereka, sama sekali tidak mungkin mencapai tata dunia stabil. Di dunia yang dinamis dan berubah ini saling pengaruh, saling pengayaan budaya dapat dijamin hanya dalam kondisi pemeliharaan keunikan setiap budaya. Konservatisme kultural, ketakutan kehilangan keuniknan budaya sendiri akibat koneksi dengan budaya lain, sikap imperialis terhadap budaya-budaya lain, adalah ancaman utama terhadap perdamaian, keamanan. Perdamaian sungguhan dan stabil dapat ditetapkan hanya pada dasar keragaman budaya.

Keragaman umat manusia yang makin meningkat, intensitas hubungan timbal balik antar budaya mempersyaratkan pentingnya faktor demokrasi. Hanya demokrasi sebagai dasar jalan pengembangan umat manusia tanpa konflik, memungkinkan pembentukan suasana konsensus dan toleransi.

Dialog dibutuhkan keterbukaan peradaban-peradaban dan budaya-budaya, sedangkan ideal masyarakat terbuka terbentuk dan menguat dalam kondisi pengorganisasian kehidupan sosial secara demokratis.

Penyelesaian masalah-masalah global tidak mungkin tercapai di luar dialog budaya-budaya, negeri-negeri. Ini pada gilirannya membutuhkan demokratisasi hubungan antar peradaban, antar budaya, antar negara. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa bentuk terbaik untuk pengembangan beradab, pembangunan

kemasyarakatan dan pengaturan permasalahan, adalah demokrasi. Tersebarnya ide-ide demokrasi dan liberalisme juga membuktikan bahwa umat manusia dapat berdialog hanya dalam kondisi demokrasi. Justeru, dialog yang merupakan bentuk dan cara komunikasi pokok dari subyek-subyek sama rata (individu, kelompok, negara, konfesi religius, budaya, peradaban), berdasarkan prinsip-prinsip demokratis, memberi kemungkinan untuk mencapai persepahaman dan konsensus dalam penyelesaian masalah-masalah global.

Tentu saja, persamaan peserta-peserta dialog tidak berarti bahwa negara-negara non demokrasi, rezim-rezim otoriter dan totaliter harus memiliki perspektif, kemungkinan yang sama. Sama sekali tidak. Dialog memberi kemungkinan untuk memberi pengaruh positif kepada hubungan politik, budaya antara bangsa-bangsa, begitu juga kepada kehidupan politik internal negara-negara-peserta, mendorong bangsa-bangsa menuju perubahan demokratis, dan mendapat pengalaman positif satu sama lain.

Pengalaman sejarah juga menunjukkan bahwa dalam hal-hal penguatan ketidakstabilan, ketegangan sosial, kataklisme dst., demokrasi dapat menciptakan kondisi untuk timbulnya rezim-rezim represif. Pengalaman negara-negara Barat di mana demokrasi memiliki tradisi lama, menunjukkan bahwa demokrasi selalu membutuhkan penyempurnaannya.

Dalam kondisi pembentukan tata dunia baru, prinsip-prinsip demokrasi dalam hubungan internasional kultural dapat ditetapkan bukan dengan pengabaian perbedaan antara peradaban-peradaban yang berbeda atau dengan introduksi model Barat dari pengorganisasian demokratis kehidupan masyarakat secara membabi buta, melainkan secara dialog budaya-budaya, secara ketoleranan, pengakuan keragaman, penyesuaian kepentingan negara-negara yang berbeda.

Hanya demokrasi yang sudah diubah menjadi faktor utama hubundan antar peradaban, yang memainkan peranan katalisator dan penyelenggara dialog budaya-

budaya, kerja sama dan persepahaman, dapat memperoleh status demokrasi universal.

Pemberian dukungan moral dan material kepada institusi-institusi publik yang memperkuat kerja sama antara orang-orang yang tergolong agama-agama dan bangsa-bangsa yang berbeda, yang memupuk rasa keterpaduan dan tanggung jawab dalam setiap bangsa, dan setiap orang, justeru adalah tugas utama dari dialog budaya.

Pada 2 Nopember tahun 2001, apabila upaya untuk menyajikan keadaan internasional sebagai pengejawantahan konflik budaya makin bertambah, dalam sidang yang ke-31 Majelis Umum UNESCO, negara-negara-peserta dengan suara bulat menerima Deklarasi umum tentang keragaman budaya. Deklarasi ini mengemukakan dialog antar budaya sebagai cara yang paling baik untuk menjamin perdamaian, dan dengan demikian, dengan tegas menolak tesis tentang tak terelakkannya konflik antara budaya-budaya dan peradaban-peradaban. Dalam dokumen normatif yang diterima untuk pertama kali ini, ditegaskan bahwa umat manusia memerlukan keragaman budaya sejauh alam hayati memerlukan keanekaragaman biologis; perlindungan keragaman budaya merupakan imperatif etis, dan tidak terpisahkan dari penghormatan terhadap pribadi manusia.

Tantangan abad XXI lebih mengaktualkan lagi pentingnya budaya di bidang perkembangan masyarakat, penjaminan keamanan internasional. Keamanan internasional tidak terbatas hanya dengan aspek militer dan politik saja, ia adalah pengertian lebih luas, dan mengandung aspek-aspek ekonomi, sosial, budaya, dan perkembangan dialog antar peradaban.

Sekarang di lebih dari 150 negara dunia ada sejumlah minoritas nasional dan keagamaan. Hanya 30 negara tidak memiliki minoritas nasional atau keagamaan. Ini membentuk 10 persen dari penduduknya. Dalam kondisi sedemikian rupa, penting sekali disadarinya keharusan penggarapan langkah-langkah terkait dengan

pemgembangan dialog budaya di tingkat internasional dan nasional. Di dunia modern kita menyaksikan juga bertambahnya arus migrasi yang menyinggung aspek-aspek ekonomi, sosial, budaya dan ekologis dari keamanan internasional. Menurut statistik PBB, jumlah migran di dunia sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2005 bertambah 36 juta jiwa, dan pada tahun 2006 mencapai 192 juta jiwa. Sesudah peristiwa-peristiwa di Timur Tengah jumlah migran makin bertambah. Proses migrasi menyebabkan juga bertambahnya interkoneksi budaya-budaya yang berbeda. Walaupun arus migrasi terarah pada pokoknya kepada negara-negara maju, namun migrasi menyebabkan konsekuensi di semua wilayah-wilayah dunia.

Menurut beberapa sumber, sekarang di seluruh dunia, lebih dari 800 juta orang mengalami keterbatasan, diskriminasi dalam kehidupan politik atas dasar kebangsaan, keagamaan dan kebahasaan. Pengalaman dunia menunjukkan bahwa walaupun kadang-kadang kaum minoritas mencapai beberapa hak sosial dan ekonomi, namun hak budaya dari mereka-mereka tidak dilindungi. Dan hal ini menyebabkan timbulnya ancaman-ancaman baru. Dari segi inilah, interkoneksi budaya-budaya bisa menjadi faktor saling pengayaan budaya-budaya maupun penjaminan keamanan internasional.

3. Di era globalisasi apabila ilmu pengetahuan, pendidikan, komunikasi berkembang pesat, proses-proses seperti migrasi, urbanisasi makin meluas, di samping bertambahnya hubungan timbal balik, saling pengaruh-mempengarugi antara negara-negara dan bangsa-bangsa, sering-sering terdapat juga hal-hal intoleransi, ekstremisme keagamaan dan etnis. Sayangnya, adanya hal-hal seperti diskriminasi ras, keagamaan dan kebangsaan, xenophobia, memberi pengaruh negatif terhadap hunungan timbal balik antara budaya-budaya yang berbeda. Oleh karena itu, dalam pengorganisasian pengembangan masyarakat, peranan toleransi sebagai mekanisme hubungan damai, makin berjadi-jadi.

Dalam komdisi sedemikian rupa, masalah toleransi diubah menjadi salah satu masalah yang paling aktual dan yang paling dibicarakan di seluruh dunia.

Dalam Deklarasi “Prinsip-prinsip Toleransi” yang diterima UNESCO pada 16 tanggal 16 Nopember tahun 1995, termaktub bahwa toleransi berarti diterimanya, difahmiinya dengan benar dan dihormatinya keragaman budaya, bentuk-bentuk pelindungan diri dan keragaman cara-cara manifestasi individualitas manusia. Ketoleranan masyarakat diukur dengan tingkat pendidikan, keterbukaan, derajat komunikabiltas dan kebebasan pendapatnya, dengan nilai-nilai moral dan etnis yang dimilikinya.

Syarat-syarat sosial dan psikologis dari toleransi adalah sebagai berikut: tingkat tingginya kesejahteraan masyarakat; pemeliharaan keaslian budaya, adanya rasa penghargaan diri yang memungkinkan menghormati budaya-budaya dan pribadi-pribadi lainnya, keterbukaan masyarakat, kemungkinan komunikasi lintas budaya, adanya pengalaman komunikasi dengan wakil-wakil budaya-budaya dan bangsa-bangsa lainnya, adanya negara hukum dan masyarakat madani, adanya kemungkinan untuk penyelesaian konflik-konflik antar bangsa dan lain-lainnya berdasarkan hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia [Харрис 2002, 354-355].

Ada beberapa tingkat toleransi yaitu tingkat sivilisasional, internasional, etnis, soial dan individual.

Dalam hubungan internasional, toleransi merupakan syarat utama untuk kerja sama dan koeksistensi negara-negara secara damai, dengan tidak tergantung besar kecilnya, tingkat perkembangan ekonominya, asal-usul etnis dan religiusnya.

Toleransi etnik dinyatakan dalam ketoleranan terhadap tata hidup asing, kebiasaan, tradisi, pendapat dan ide-ide asing. Toleransi etnik biasanya timbul dalam situasi bermasalah, dalam keadaan konflik dengan kelompok etnik lain.

Toleransi sivilisasional berarti non-kekerasan (unviolence) antara budaya-budaya yang berbeda.

Toleransi sosial-budaya, sebagai sifat moral individu, dianggap sebagai sikap toleran terhadap orang-orang lain, dengan tidak memandang asal-usul etnis, kebangsaan dan budayanya. Toleransi dinyatakan dalam usaha-usaha kepentingan-kepentingan dan pandangan-pandangan yang berbeda untuk mencapai saling menghormati dan persepahaman.

Komponen-komponen dari struktur toleransi sosial adalah penghormatan, empati, kemurahan hati dan keramahan.

Toleransi sebagai budaya pemahaman orang "lain", membentuk dasar dialog, dan dipandang sebagai cara pencegahan konflik-konflik etno-budaya.

Budaya merupakan arti dan nilai pokok adanya umat manusia. Di luar budaya, adanya bangsa-bangsa, negara-negara menghilangkan artinya.

Sebagai akibat proses globalisasi, budaya setiap negara makin kuat mengalami internasionalisasi. Dalam suasana sedemikian rupa masalah utama adalah pemeliharaan ruang budaya yang memungkinkan pemeliharan kepribadian nasional. Inilah inti masalah imbangan. Untuk menemukan imbangan ini dan menolong persepahaman antara budaya-budaya dan peradaban-peradaban yang berbeda, perlu menepati sejumlah prinsip dan ketentuan.

Ada pendapat bahwa di era globalisasi tampaknya akan terjadi homogenisasi budaya, dan homogenisasi budaya itu tampaknya dimenangkan oleh hegemoni budaya Barat (westernisasi), karena merekalah yang didukung oleh media masa yang kuat. Akan tetapi, asumsi penyeragaman oleh budaya Barat tidak sepenuhnya benar. Dunia memang terintegrasi dalam satu sistem melalui media komunikasi, tetapi tidak terjadi totalitas integrasi antar budaya, sebab masing-masing bangsa memaknai dan mengapresiasi budaya global dengan menggunakan basis kultural masing-masing, sehingga yang terjadi adalah reproduksi budaya global dengan

citarasa lokal. Dengan demikian, yang lahir dari globalisasi budaya justru merupakan fenomena multikulturalisme.

Sebagai penutup, saya ingin juga memberi beberapa informasi tentang "Proses Baku".

"Proses Baku" merupakan inisiatif yang memperhitungkan pengembangan dialog antarbudaya. Inisiatif ini diluncurkan oleh Presiden Republik Azerbaijan Ilham Aliyev dalam konferensi para menteri kebudayaan negara-negara Eropa dan daerah-daerah tetangganya yang bertema "Dialog antarbangsa adalah dasar pembangunan berkelanjutan dan perdamaian di Eropa dan daerah-daerah tetangganya" yang terlansung di Baku pada 2-3 Desember tahun 2008. Di konferensi ini, dengan partisipasi juga 10 negara Islam, untuk pertama kali, diletakkanlah dasar format baru. Di konferensi ini di mana wakil-wakil tingkat tinggi pada keseluruhannya dari 48 negara dan 8 organisasi internasional dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat berpartisipasi, atas inisiatif Azerbaijan, untuk pertama kali para peserta menerima "Deklarasi Baku tentang berkampanyenya untuk dialog antarbudaya". Dengan demikian, diletakkanlah dasar "Proses Baku" dan proyek "Kaum seniman demi dialog" yang disarankan oleh Azerbaijan dengan tujuan untuk meneruskan proses tersebut dengan sukses. Dalam konferensi itu pidato dengan konten yang mendalam yang diucapkan oleh Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev, saran dan rekomendasi yang dikemukakan olehnya, menyebabkan dijadikannya "Proses Baku" sebagai inisiatif global. Pelaku-pelaku utama "Proses Baku"adalah Pemerintah Republik Azerbaijan, UNESCO, United Nations Alliance of Civilazions, Dewan Eropa, Pusat Utara-Selatan Dewan Eropa, ISESCO, Organisasi Pariwisata Dunia UN. "Proses Baku" bertujuan:

- Pengembangan saling pengertian, dialog dan toleransi antara budaya-budaya yang berbeda;

- Pengembangan kerjasama antara masyarakat-masyarakat Islam dan Barat;
- Dengan tujuan untuk mengurangi ketegangan antara bangsa-bangsa, dan ketegangan budaya, memberi dukungan kepada kekuatan-kekuatan yang mendamaikan dan menenangkan, dan menciptakan suasana pengehormatan dan persepahaman antara budaya-budaya yang berbeda;
- Menentukan kemungkinan-kemungkinan warisan budaya dan seni, dan menggunakan potensi kemungkinan itu untuk pelaksanaan dialog dan kerjasama antarbudaya dengan efektif;
- Mendukung kegiatan-kegiatan kultural dan seni; mengakui kaum seniman dan orang-orang kreatif sebagai pendorong dalam penciptaan saling pengertian dan dialog;
- Dengan penyertaan negara-negara peserta dan masyarakat madani, mengembangkan dialog antara organisasi-organisasi internasional dan kedaerahan yang berkompeten.

Di konferensi "Proses Baku"yang berikut yang terlangsung pada Oktober tahun 2009 di Baku, negara-negara-anggota Dewan Eropa bersama dengan negara-negara-anggota Organisasi Konferensi Islam, mengambil keputusan tentang diubahnya "Proses Baku" sebagai inisiatif regional menjadi gerakan global. Sesudah itu, "Proses Baku" setiap tahun diadakan dalam format dialog budaya yang diikuti wakil-wakil dari mayoritas negara-negara dunia.

Kesimpulan.

1. Tidak ada budaya "tinggi" dan budaya "rendah", seperti tidak ada peradaban "tinggi" dan peradaban "rendah". Semua budaya dengan sendirinya memberi sumbangan unik untuk khazanah kebudayaan dunia.

2. Semua peserta dialog adalah mitra setara, dan harus memperhitungkan kepentingan satu sama lain, mendengar dan mendengarkan satu sama lain. Masalah-masalah yang ada dalam hubungan internasional dapat diselesaikan secara konstruktif hanya dengan memperhitungkan imbangan kepentingan semua pihak.

3. Mencapai menyelesaikan masalah-masalah yang ada, dengan penggunaan paksaan atau tekanan, tidak mungkin. Penggunaan paksaan atau tekanan, tentu, bersifat sementara, dan dapat menyebabkan krisis atau ancaman yang baru, yang lebih gawat. Untuk pencegahan hal-hal sedemikian rupa, diperlukan pendirian pusat-pusat diplomasi preventif dalam skala kedaerahan dan dunia.

4. Dialog budaya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses perkembangan historis dunia, sebagai arah strategis pembentukan tatanan dunia, memerlukan tanggung jawab khusus di semua tingkat hubungan interkoneksi yaitu di tingkat internasional, kedaerahan, kenegaraan, institusi-institusi non-pemerintah dan individu.

DAFTAR PUSTAKA

1. Azizan Baharuddin 2005 – Azizan Baharuddin. Dialog peradaban: peranan dan kepentingannya di Malaysia. Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan: Institut Perkembangan Minda (INMIND) & Pusat Dialog Peradaban, Universiti Malaya, 2005 // www.worldcat.org/title/dialog-peradaban...di.../73222844).

2. Hungtington 1996a – Hungtington Samuel P. West is Unique and not so Universal // Foreign Affairs. N.Y. 1996, dekabr, p.28-46; http:// iscte.pt

3. Hungtington 1996 b – Hungtington Samuel P. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, New York, Simon & Schuster, 1996.

4. Əliyeva 2011 – Əliyeva M. Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu çərçivəsində "Qadınlar mədəniyyətlərarası dialoqun əsas təmsilçiləri" mövzusunda keçirilmiş sessiyada çıxışı.// "Azərbaycan", 2011-ci il, 9 aprel.

5. Shah Rani 2015 – Shah Rani. Dialog Peradaban sebagai Satu Usaha Memupuk Saling Persefahaman dan Keamanan Antarabangsa. 2015 // https://prezi.com/l7hkqf-gjnal/dialog-antara-tamadun/

6. Лапин 2010 – Лапин Н.И. Универсальные ценности и многообразие жизненных миров людей. // Диалог культур и партнерство цивилизаций: становление глобальной культуры. М., 2010, с. 105-107.

7. Лихачев Д.С. Декларация прав культуры и ее международное значение // Лихачев Д.С. Университетские встречи. 16 текстов. СПб, 2006; http:// fond.srb.ru

8. Садохин А.П. Межкультурная коммуникация. М.: Альфа, 2006, 288с.

9. Харрис Р. Психология массовых коммуникаций. 4-ое международное издание. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002; www.narod.ru